

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena mengenai modal intelektual di Indonesia mulai berkembang setelah munculnya PSAK No.19 (Revisi 2000) tentang aset tidak berwujud (Ulum, 2009:3). Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2000), aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009:19.2).

Modal intelektual didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen utama organisasi yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital* (Pulic, 1998:7; Bontis, 2001:45; Serrat, 2011:2). Tiga elemen tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman manusia, dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing dari suatu perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003:38).

Modal intelektual menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern. Laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya aset tidak berwujud berupa modal intelektual dan besarnya nilai yang diakui. Para akuntan dituntut mencari informasi lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual mulai dari pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003:37).

Pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005:583).

Salah satu pengungkapan sukarela adalah pengungkapan mengenai modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual adalah pengungkapan tentang modal non-fisik atau modal tidak berwujud atau tidak kasat mata yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan dalam penciptaan nilai perusahaan (Suwarjuwono dan Kadir, 2003:52).

Penelitian tentang pengungkapan modal intelektual menarik dilakukan di Indonesia. Alasannya karena di Indonesia belum terdapat pedoman baku dalam mengukur modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual merupakan hal baru yang belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Meizaroh dan Lucyanda, 2012:66). Selain itu, banyak pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh profesi akuntansi hanya terkait dengan *physical capital* (modal fisik). Pengungkapan wajib yang terkait dengan *physical capital* kurang mencukupi kebutuhan pemakai sehingga menimbulkan kesenjangan

informasi. Akibatnya, pengungkapan modal intelektual menjadi hal penting yang seharusnya juga diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Faktanya, perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih rendah dan kurang menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Penelitian Purnomosidhi (2006:15) menemukan bahwa rata-rata jumlah atribut modal intelektual yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia sebesar 56%. Sementara hasil penelitian Suhardjanto dan Wardhani (2010:79) menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengungkapan modal intelektual perusahaan di Indonesia hanya sebesar 34,5%.

Teori dalam literatur akuntansi terkait faktor pendorong pengungkapan modal intelektual adalah *agency theory*/ teori keagenan (Palepu dan Healy, 2001:406). Inti dari *agency theory* adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan investor (*principal*) dan pengendalian di pihak manajemen (*agent*). Pihak *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* memiliki lebih banyak informasi penting mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang akan meningkatkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen dan Meckling, 1976:309).

Instrumen yang bisa digunakan perusahaan untuk mengontrol biaya keagenan salah satunya adalah dengan penerapan *corporate governance* (Healy dan Palepu, 2001:410 dan Cerbioni dan Parbonetti, 2005:5).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2001:3) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Banyak penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance* dengan pengungkapan modal intelektual. Penelitian di Indonesia seperti penelitian Fitriani dan Purwanto (2010) serta Meizaroh dan Lucyanda (2012) menyimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* memiliki kesadaran yang tinggi untuk memperluas tingkat pengungkapan modal intelektual.

Penelitian di luar negeri telah banyak dilakukan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual, seperti Haniffa dan Cooke (2002), Cerbioni dan Parbonetti (2005), Bukh *et al.* (2005), White *et al.* (2007), Abeysekera (2010), Taliyang dan Jusop (2011), dan Chiedu *et al.* (2013). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian terkait pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual terbatas pada kriteria tertentu saja sebagai proksi dari *corporate governance*, misalnya susunan dewan komisaris dan direksi (Fitriani dan Purwanto, 2010; Zulkarnaen dan Mahmud, 2013), struktur kepemilikan (Saleh *et al.* 2009; Istanti, 2009), dan komite audit (Chiedu *et al.* 2013). Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan satu kriteria saja sebagai pengukuran *corporate governance* belum mencerminkan pengaruh *corporate governance* secara keseluruhan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kualitas *corporate governance* pada penelitian ini diukur menggunakan indeks pengungkapan *corporate governance* yang dikembangkan dari penelitian Leal dan Carvalhal-da-Silva (2005) dan Silveira dan Barros (2006) di Brazil. Alasan penggunaan instrumen indeks ini karena asas-asas *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dapat ditunjukkan oleh keberadaan indikator-indikator yang dikemukakan dalam penelitian Leal dan Carvalhal-da-Silva (2005) dan Silveira dan Barros (2006). Indikator-indikator itu antara lain akses terhadap informasi, isi informasi publik dan pengungkapan, struktur dan fungsi dewan, struktur kepemilikan perusahaan, dan hak pemegang saham.

Penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual berdasarkan *agency theory*. Menurut Ferry dan Jones (1979), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya

perusahaan yang ditunjukkan dengan besar kecilnya aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset. Semakin besar total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil (Suwardjono, 2005:584). Berdasarkan *agency theory*, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976:328). Perusahaan besar memiliki jumlah pemegang saham yang banyak dan lebih menjadi sorotan di pasar modal. Akibatnya, praktik-praktik pengungkapan yang positif seperti pengungkapan modal intelektual diprediksi dilakukan jika perusahaan berupaya meminimalisir *agency cost* (White *et al.*, 2007:521).

Penelitian Ulum dkk. (2009) serta Suhardjanto dan Wardhani (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi modal intelektual dalam laporan tahunan. Hasil penelitian White *et al.* (2007) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan kapitalisasi pasar berhubungan signifikan dengan pengungkapan modal intelektual.

*Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya dan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2012:127). Rasio *leverage*

merupakan proporsi hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham (Ulum, 2009:200). *Agency theory* memprediksi bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, sehingga perusahaan akan menyediakan informasi secara komprehensif melebihi yang diwajibkan oleh standar. Penelitian Ulum dkk. (2009) menyimpulkan bahwa *leverage* terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian Ulum dkk. (2009) memperkuat temuan White *et al.* (2007) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *leverage* dengan pengungkapan modal intelektual.

Teori lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang pengungkapan modal intelektual adalah teori pensignalan/ *signalling theory* (Suwardjono, 2005:583). Menurut *signalling theory*, manajemen berusaha mengungkapkan informasi yang menurut pertimbangan sangat diminati oleh investor kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*), meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan oleh standar. Pengungkapan lebih banyak tentang modal intelektual yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan harapan bisa memberikan sinyal kepada investor tentang prospek bagus perusahaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini menambahkan variabel kinerja keuangan sebagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual karena didukung oleh *signalling theory*. Berdasarkan *signalling theory*, kinerja keuangan yang tinggi digunakan untuk memberi isyarat yang dapat dipercaya bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menurunkan biaya modal. Perusahaan dengan kinerja baik akan tampil beda dengan perusahaan yang kurang baik kinerjanya, yaitu dengan cara mengungkapkan secara sukarela informasi non-keuangan termasuk modal intelektual (Suhardjanto dan Wardhani, 2010:74).

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan kesimpulan yang tidak konsisten mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian Haniffa dan Cooke (2002), Chang *et al.* (2007), Suhardjanto dan Wardhani (2010), dan Saendy (2015) membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi akan semakin memperbanyak pengungkapan modal intelektual. Sementara penelitian Purnomosidhi (2006), Sonnier *et al.* (2007), dan Meizaroh dan Lucyanda (2012) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang semakin tinggi akan mengurangi pengungkapan modal intelektual dibanding perusahaan yang berkinerja buruk.

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh *return on assets* (ROA) sebagai pengukuran kinerja operasional dan *earnings per share* (EPS) sebagai pengukuran kinerja pasar. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas keseluruhan aset yang dimiliki (Palepu *et al.*, 2004:5-6).



Pengukuran kinerja yang kedua dalam penelitian ini adalah *earnings per share* (EPS) atau laba per saham yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh setiap lembar saham bagi pemegang saham (Kasmir, 2010:116). Informasi mengenai ROA dan EPS diharapkan mampu memberikan penilaian yang baik bagi investor atas informasi kinerja perusahaan dalam melakukan investasi di suatu perusahaan.

Latar belakang penelitian ini diantaranya adalah adanya Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat salah satunya tentang tata kelola perusahaan/ *corporate governance* (Kemenkeu RI BAPEPAM dan LK, 2012:4). Oleh karena itu penulis ingin membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka akan lebih banyak mengungkapkan informasi secara sukarela, termasuk pengungkapan modal intelektual.

Penelitian ini juga dianggap penting karena belum adanya aturan baku cara pengukuran dan penyajian modal intelektual di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur aset tidak berwujud yaitu PSAK No.19 (revisi 2000), tetapi dalam regulasi tersebut tidak mengatur cara pengukuran dan item-item modal intelektual yang perlu diungkapkan secara rinci. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan tantangan bagi para akuntan untuk mencari informasi mengenai cara mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan modal intelektual (Purnomosidhi, 2006:2).

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena kelompok perusahaan ini merupakan emiten terbesar dari perusahaan yang terdaftar di bursa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **”Pengaruh Kualitas *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan modal intelektual?
4. Bagaimana pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pengungkapan modal intelektual?
5. Bagaimana pengaruh *earnings per share* (EPS) terhadap pengungkapan modal intelektual?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai bagaimana:

1. Pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan modal intelektual.
4. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pengungkapan modal intelektual.
5. Pengaruh *earnings per share* (EPS) terhadap pengungkapan modal intelektual.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada akademik terutama pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi, bahan referensi dan data tambahan untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan manajemen perusahaan tentang pentingnya pengungkapan modal intelektual bagi pengambilan keputusan dan nilai tambah perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah perlu dibuat regulasi tentang bagaimana cara mengakui, mengukur, dan menyajikan modal intelektual mengingat pentingnya informasi modal intelektual.